

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEBAGAI EVALUASI KINERJA PADA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BRIAN WISDA HAFID
B200050092

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah telah memaksa organisasi pemerintah (pemerintah daerah) untuk dapat meningkatkan kinerjanya, tidak hanya kinerja financial, tapi mencakup semua aspek yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Namun demikian, baik buruknya kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari fungsi financial (keuangan) yang dimiliki pemda. Aktivitas pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan keuangan.

Otonomi daerah ini didasarkan pada kemampuan dan potensi daerah untuk mandiri secara ekonomi, artinya pada saat otonomi daerah, daerah yang bersangkutan harus mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintah daerahnya termasuk menggaji pegawai yang kini dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah

perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran (Mardiasmo,2002).

Dalam perkembangannya kedua kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini mengatur tentang Pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah punya kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan.

Sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan:

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada huruf (a) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada huruf (b).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dengan kelengkapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan daerah di Kabupaten Klaten dalam masa Otonomi Daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI

EVALUASI KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi di
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten)

B. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 – 2007?
- 2) Bagaimana perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 – 2007?
- 3) Bagaimana perkembangan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Klaten dalam masa Otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 – 2007?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian daerah kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 - 2007.
- 2) Untuk mengetahui perkembangan efektivitas daerah kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 - 2007.
- 3) Untuk mengetahui perkembangan efisiensi daerah kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah selama tahun anggaran 2003 - 2007.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah.

2. Manfaat bagi akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan pihak fakultas.
- b. Sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian kepada masyarakat.

3. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan Pemerintah Daerah atau peneliti lain yang sejenis, atau pengembangan lain dari penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah penulisan skripsi ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dan juga penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya. Dimana hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk penelitian berikutnya khususnya penelitian ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV. ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang Analisis Data, Penerimaan PAD dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam masa otonomi daerah.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil pembahasan, saran-saran dari penulis dan keterbatasan di dalam penelitian ini.